

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada akhir tahun 2019, muncul suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus Corona yang terdeteksi di Kota Wuhan, Tiongkok (Asriansyah, 2022). Dalam kasus COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Dalam istilah kesehatan, pandemi merupakan terjadinya wabah suatu penyakit yang menyerang banyak korban, serempak di berbagai negara. Saat WHO menetapkan status pandemi global terhadap COVID-19, tercatat ada 118.000 kasus penyakit tersebut yang tersebar di 110 negara di seluruh dunia. Status COVID-19 awalnya ditetapkan sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC). Setelah mendeklarasikan status PHEIC itu, WHO merekomendasikan seluruh negara untuk mengantisipasi COVID-19 seperti melakukan pengawasan dan deteksi dini secara aktif (Allianz Indonesia, 2020).

Terjadinya COVID-19 tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga sangat mempengaruhi semua aspek dalam bidang kehidupan, salah satunya bidang ekonomi. Semua negara merasakan dampak akibat menyebarnya penyakit COVID-19, termasuk ASEAN. Menurut data Asian Development Bank (ADB), selama Pandemi COVID-19, ASEAN mengalami penurunan ekonomi dari 4,7% di tahun 2019 menjadi 1% di kuartal pertama tahun 2020. Berdasarkan laporan ILO, pekerja di kawasan ASEAN mengalami penurunan atau sama sekali kehilangan pendapatan. Tiga negara ASEAN yang tergabung dalam IMT-GT (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) menyatakan komitmennya untuk bersatu menghadapi dampak pandemi COVID-19. Komitmen ini diwujudkan dalam bentuk pemulihan dengan mengedepankan protokol kesehatan (CNBC Indonesia, 2020).

Pada tahun 2020, Tiongkok memperlihatkan vaksin Corona yang diproduksi Sinovac Biotech dan Sinopharm untuk pertama kali yang dipajang dalam botol-botol kecil di sebuah pameran di Beijing. Perwakilan Sinovac mengatakan bahwa perusahaannya telah menyelesaikan pembangunan pabrik vaksin yang mampu memproduksi 300 juta dosis dalam setahun. Sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan tidak ada vaksin corona hingga pertengahan 2021. Meski demikian, PBB menyambut baik perkembangan vaksin yang dilakukan oleh Tiongkok dan sejumlah kalangan (CNN Indonesia, 2020). Keberhasilan Tiongkok dalam membuat vaksin yang kemudian diproduksi secara massal mendorong negara-negara di ASEAN untuk secara aktif melakukan kerjasama baik secara bilateral dengan berbagai negara, salah satunya Tiongkok melalui diplomasi vaksin. Dengan adanya kerjasama ini, maka negara-negara ASEAN memperoleh banyak keuntungan. Seperti akses prioritas untuk melakukan pemesanan vaksin terlebih dahulu dan pemulihan ekonomi Indonesia sebagai negara ASEAN yang dijadikan sebagai pusat produksi vaksin COVID-19 Tiongkok untuk ASEAN.

Dalam dunia kesehatan global, diplomasi vaksin bukan hal baru. Sejak vaksin pertama kali ditemukan dalam sejarah modern tahun 1789, diplomasi sebagai metode untuk penggunaan vaksin di Rusia, Turki, Spanyol, hingga suku asli Amerika di wilayah Meksiko dan Amerika Serikat mulai diperkenalkan Edward Jenner pada tahun 1800 (Pearson, 2004). Peter J. Hotez menjelaskan dalam bukunya bahwa terdapat dua bentuk diplomasi terkait vaksin. Yang pertama, Diplomasi Vaksin (*Vaccine Diplomacy*) yang merupakan percabangan dari Diplomasi Kesehatan Global (*Global Health Diplomacy*) yang bergantung pada penggunaan vaksin sebagai tujuan diplomasi dan pengiriman vaksin sebagai alat diplomasi. Kedua, Diplomasi Sains Vaksin (*Vaccine Science Diplomacy*) yang merupakan gabungan antara diplomasi kesehatan global dan diplomasi sains (Hotez, "Vaccine Diplomacy": Historical Perspectives and Future Directions, 2014).

Permintaan vaksin yang meningkat dan mendesak serta penimbunan vaksin yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memicu krisis pasokan vaksin seluruh dunia pada awal tahun 2021 yang menyebabkan permintaan global terhadap

produk vaksin Tiongkok melonjak. Pada Maret 2021, Beijing telah memberikan jutaan dosis gratis kepada 69 negara dan mengekspor ke lebih dari 28 negara (Huang, 2021). Sebagai salah satu kawasan yang paling terdampak COVID-19 dengan tambahan kasus paling tinggi dilaporkan di Singapura sebanyak 50.611 per 30 Juni 2022. Kemudian, negara-negara di ASEAN seperti Vietnam, Malaysia, Indonesia, dan Indonesia juga melaporkan lonjakan kasus COVID-19. Lonjakan kasus COVID-19 terutama di Singapura dipicu oleh menyebarnya sub-varian corona baru, yaitu Omicron BA.4 dan BA.5 (Maesaroh, 2022).

Dengan terjadinya lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di ASEAN, secara kolektif negara-negara di ASEAN telah memesan sekitar 203 juta vaksin dari Tiongkok yang merupakan 25,6% dari komitmen vaksin Tiongkok. Setelah Tiongkok bertemu dengan utusan dari Indonesia dan Filipina di Provinsi Yunan serta mengunjungi Kamboja, Malaysia, Laos, Thailand, dan Singapura pada Oktober 2020 (Sekretariat Nasional Asean - Indonesia, 2020), Indonesia menjadi konsumen vaksin COVID-19 terbesar di ASEAN dengan total pembelian sebanyak 125 juta dosis Sinovac. Kemudian Filipina menempati peringkat kedua dengan memesan 25 juta dosis Sinovac. Negara-negara lain seperti Thailand, Kamboja, dan Malaysia juga ikut memesan dengan rata-rata pembelian 15 juta dosis vaksin (Zaini, *China's Vaccine Diplomacy in Southeast Asia - A mixed Record*, 2021).

Table 1. Data distribusi vaksin COVID-19 Tiongkok di Asia Tenggara.

<u>Negara</u>	<u>Jenis Vaksin</u>	<u>Pendistribusian</u>	<u>Total Dosis</u>
Indonesia	Sinovac, Sinopharm, CanSino	Dibeli	156,000,000 dosis
Vietnam	Sinopharm	Dibeli	500,000 dosis
Myanmar	Sinovac	Dibeli/Donasi	500,000 dosis
Kamboja	Sinopharm	Donasi	10,000,000 dosis
Laos	Sinopharm	Donasi	11,000,000 dosis
Malaysia	Sinovac, Sinopharm, CanSino	Dibeli	67,000,000 dosis
Thailand	Sinovac	Dibeli	20,000,000 dosis
Filipina	Sinovac	Dibeli dan donasi	25,600,000 dosis

Sumber: Ivana Karaskova dan Veronika Blablova, "The Logic of China's Vaccine Diplomacy," *The Diplomat*, 24 March 2021

Indonesia sebagai Ketua Kerjasama Kesehatan ASEAN, menyelenggarakan pertemuan tingkat Pejabat Tinggi Kesehatan ASEAN untuk memetakan dan mensinergikan sejumlah inisiatif baru dari badan sektoral kesehatan dan juga non-kesehatan yang perlu ditindaklanjuti oleh badan sektoral ASEAN sebagai upaya konkrit penanganan COVID-19 di kawasan ASEAN. Sejak munculnya pandemi COVID-19 pada awal Januari 2020, sektor kesehatan ASEAN telah melakukan respons cepat dan mengaktifkan berbagai mekanisme untuk memahami karakteristik COVID-19, bertukar informasi mengenai upaya yang dilakukan di masing-masing negara ASEAN dan juga di negara mitra ASEAN, salah satunya Tiongkok (Rokom, 2021).

Diplomasi vaksin COVID-19 adalah bukti upaya negara-negara di dunia termasuk ASEAN untuk dapat menghentikan penyebaran COVID-19. Mereka berupaya untuk memenuhi kebutuhan vaksin serta fasilitas kesehatan lainnya untuk menangani

penyebaran wabah COVID-19. Diplomasi vaksin dianggap sebagai hasil dari kesadaran kolektif multilateral bahwa pandemi ini harus diselesaikan secara bersama-sama, saling bekerjasama dan gotong royong.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah, dalam melakukan penelitian ini penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

“Mengapa Tiongkok melakukan Diplomasi Vaksin ke ASEAN?”

C. Kerangka Teori

Untuk dapat menjawab rumusan masalah, penulis akan menganalisa penelitian ini dengan menggunakan Teori Diplomasi Publik, Teori Interdependensi, dan *Soft Power*.

a. Diplomasi Publik

Diplomasi Publik mempunyai pengertian sebagai upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara terhadap publik sendiri maupun masyarakat internasional untuk memperbaiki citra. Hubungan diplomasi publik dengan citra suatu negara adalah bahwa citra dibangun berdasarkan pengalaman yang dialami suatu bangsa. Citra dapat berubah setiap waktu di saat orang menerima pesan baru. Dengan demikian, citra yang baik dapat menumbuhkan opini publik yang menguntungkan yang kemudian menjadi modal utama untuk melaksanakan diplomasi publik yang juga menguntungkan. Citra suatu negara yang dibangun oleh diplomasi publik dapat menumbuhkan kepercayaan negara lain tentang potensi dan prestasi negara yang bersangkutan sehingga dapat memberikan keuntungan kepada negara lain apabila melakukan kerjasama dalam berbagai bidang dan tentunya negara yang bersangkutan juga akan mendapatkan keuntungan.

Dalam konteks ini, pemerintah Tiongkok mendapatkan citra buruk akibat munculnya kasus COVID-19 dan pengendalian kasus COVID-19 yang sebelumnya tidak memadai. Menurut *Pew Research Center*, Tiongkok memiliki rekor terburuk atas pandangan negatif terhadapnya dalam sejarah (Silver, Devlin,

& Huang, 2020). Dalam hal ini, diplomasi publik digunakan sebagai media *nation branding*, karena diplomasi publik bisa digunakan mencapai kepentingan nasional suatu negara melalui *understanding, informing, and influencing foreign audiences*. Jika *prises* diplomasi tradisional dikembangkan melalui mekanisme *government to government relations*, maka diplomasi publik lebih ditekankan pada *government to people* atau bahkan *people to people relations*, atau bisa disebut dengan *second track diplomacy*, yaitu upaya diplomasi yang dilakukan oleh elemen-elemen *non-government* secara tidak resmi (*Unofficial*). Dalam hal ini, *second track diplomacy* bukan berarti bertindak sebagai pengganti *first track diplomacy*, akan tetapi turut melancarkan jalan bagi negosiasi.

Salah satu jalan yang bisa ditempuh dengan menggunakan diplomasi publik adalah melalui jalur kesehatan. Kesehatan merupakan salah satu isu penting dalam pelaksanaan hubungan luar negeri dan upaya dalam membangun ketahanan kesehatan, mulai dari ketahanan kesehatan nasional, regional, dan dunia. Dalam hal ini publik diplomasi yang dilakukan Tiongkok, melalui kebijakan luar negerinya dengan memberikan bantuan dan fasilitas kesehatan kepada negara-negara yang terkena dampak COVID-19, dan mengirimkan pakar medisnya ke luar negeri untuk membantu negara-negara lain dalam menangani wabah COVID-19.

b. Soft Power

Soft power adalah suatu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tanpa melalui paksaan. *Soft power* bertumpu pada sumber daya, nilai-nilai dan kebijakannya (Nye, 2018). *Soft power* digunakan sebagai alat kebijakan luar negeri untuk menyelenggarakan hubungan internasional. *Soft power* berasal dari daya tarik politik, ekonomi, dan sosial, dan apakah pihak lain mengikutinya. Dalam konteks ini, terlepas dari keberhasilan Tiongkok dalam membendung pandemi dalam negeri dan kemampuan Tiongkok yang dapat menyediakan vaksin lebih awal, hanya sedikit dari negara-negara di Eropa yang berusaha untuk meniru model masyarakat Tiongkok (Leigh, 2021).

Terdapat hubungan yang baik antara *soft power* dengan meningkatkan citra suatu negara, yaitu jika peningkatan citra sebagai teknik dari *soft power* digunakan secara strategis, hal ini memproyeksikan citra positif suatu negara dan akibatnya negara akan mendapatkan *soft power* (Lee, Vaccine diplomacy: nation branding and China's COVID-19 soft power play, 2021). Peningkatan citra juga dapat dijadikan sebagai alat yang penting dalam mengembangkan dan memelihara *soft power* (Lee, Vaccine diplomacy: nation branding and China's COVID-19 soft power play, 2021). Dalam menggunakan diplomasi vaksin, Tiongkok dituduh melakukan diplomasi vaksin sebagai alat soft power untuk mencapai kebijakan luar negerinya termasuk meningkatkan kepentingan pengaruh geopolitik dan meningkatkan citra Tiongkok (Dijk & Lo, 2023).

c. Teori Interdependensi

Teori Interdependensi atau saling ketergantungan merupakan sebuah teori yang muncul dari perspektif liberalis. Interdependensi yang dimaksud adalah suatu ketergantungan yang disebabkan oleh kerjasama yang tercipta antara dua aktor atau lebih karena adanya rasa saling membutuhkan (Efriza & Indrawan, 2021). Menurut Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye, teori interdependensi secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah hubungan timbal balik atau hubungan saling ketergantungan satu sama lain dalam hubungan internasional. Dalam teori interdependensi, suatu pihak tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri secara utuh. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya peran dari pihak lain sebagai pelengkap untuk melakukan interaksi. Interdependensi memandang bahwa kerjasama antara aktor-aktor Internasional sudah ada sejak dahulu dalam hubungan internasional.

Dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berimbas multidimensional dan menjadi ancaman bersama yang dihadapi oleh negara-negara di dunia, pendekatan ideal yang paling cocok adalah peningkatan kerjasama antar negara dalam menangani permasalahan ini. Dengan meningkatnya keterlibatan antar negara, maka tingkat interdependensi juga semakin tinggi. Mengutip teori

interdependensi Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye yang dijelaskan sebelumnya, spekulasi kemudian mengarah kepada upaya Tiongkok yang memanfaatkan kerentanan dan sensitivitas negara yang sedang dilanda krisis COVID-19 untuk menciptakan ketergantungan melalui diplomasi vaksin. Dalam survei yang digelar oleh ISEAS-Yusof Ishak Institute Singapura yang melibatkan 1032 responden penduduk negara ASEAN, mereka menilai bahwa meskipun Tiongkok dianggap sebagai sumber dari masalah pandemi, Tiongkok adalah negara yang memberikan paling banyak bantuan selama COVID-19 (Sekretariat Nasional ASEAN Indonesia, 2021).

D. Hipotesis

Dengan merujuk pada kerangka teoritik yang digunakan oleh penulis diatas, maka penulis menarik suatu hipotesis bahwa alasan Tiongkok melakukan diplomasi vaksin ke ASEAN untuk memulihkan citra Tiongkok yang dianggap sebagai sumber dari masalah pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Kepentingan Tiongkok lainnya adalah untuk meningkatkan pengaruhnya di kawasan ASEAN serta untuk meningkatkan perekonomiannya.

E. Tujuan Penelitian

Secara umum, berdasarkan pada penjabaran diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kepentingan nasional Tiongkok dalam melakukan diplomasi vaksin ke wilayah ASEAN.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, sebuah penelitian dilakukan untuk mencari sebuah jawaban dari pertanyaan yang ingin diketahui peneliti, begitu pula dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan pada tulisan ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Metode ini dilakukan dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan ditinjau berdasarkan pada studi kasus dalam penelitian ini, sehingga memberikan informasi bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

G. Jangkauan Penelitian

Dalam rangka membatasi serta memfokuskan permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini, maka penulis melakukan pembatasan dalam kurun waktu antara tahun 2020-2022 dimana COVID-19 masih tersebar di seluruh dunia dan menjadi pandemi global yang membuat negara-negara khususnya Tiongkok, membuat vaksin agar virus COVID-19 bisa terkendali. Selain itu, indikator lainnya berupa kepentingan nasional Tiongkok di kawasan ASEAN yang dilakukan melalui diplomasi vaksin.

H. Rencana Sistematika Penulisan

BAB I	: Dalam bab ini merupakan pendahuluan yang diringkas secara singkat untuk menjelaskan secara garis besar mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesis, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.
BAB II	: Dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai Belt Initiative Road, Health Silk Road, dan Diplomasi Vaksin Tiongkok secara spesifik di kawasan ASEAN.
BAB III	: Dalam bab ini penulis menjabarkan tentang kepentingan nasional Tiongkok dalam melakukan diplomasi vaksin di kawasan ASEAN.
BAB IV	: Dalam bab ini berisi kesimpulan.